

**ANALISIS PENGARUH PDRB, INFLASI, NILAI KURS, DAN TENAGA
KERJA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KABUPATEN
CILACAP, BANYUMAS, PURBALINGGA, KEBUMEN DAN PURWOREJO**

Mispiyanti¹; Ika Neni Kristanti²

¹STIE Putra Bangsa, Pejagoan, Kebumen, Indonesia (mispiyanti@gmail.com)

²STIE Putra Bangsa, Pejagoan, Kebumen, Indonesia (kris_tanty@yahoo.com)

ABSTRACT

Taxes serve to reduce inequalities among the population and thus demand substantial government expenditures for state financing which one of the sources is tax revenue. But many factors affect the high low tax revenue. This study aims to determine partially whether the GDP, inflation, the exchange rate of rupiah against US Dollar and labor have a positive effect on tax revenues and also to determine whether GRDP, inflation, the exchange rate of rupiah against US Dollar and labor in together have a positive effect on tax revenue. This study uses data realization of tax revenue, GDP data, inflation data, and employment data in the districts of Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo as well as data on the Rupiah exchange rate against US Dollar. The results show that partially PDRB and labor positively affect the tax revenue while inflation and the exchange rate of rupiah against US Dollar have no positive effect on tax revenue. In together the variables PDRB, inflation, exchange rate and labor, significantly affect the variable tax revenue.

Keywords: tax revenue, GRDP, inflation, US Dollar exchange rate, labor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah dan pembebanannya berhubungan dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2011). Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan umum dari semua kegiatan pemerintah diantaranya adalah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, alokasi pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga menuntut pengeluaran pemerintah yang besar untuk pembiayaan negara dimana salah satu sumbernya adalah penerimaan pajak.

Di tahun 2012 sampai 2014, penerimaan pajak selalu dibawah target yang ditetapkan. Kurangnya penerimaan pajak dari target yang telah ditentukan pada tahun 2012 adalah karena pengaruh krisis global terhadap perusahaan di dalam negeri. Krisis global menyebabkan turunnya kinerja penjualan yang berakibat pada menurunnya penerimaan pajak. Tak tercapainya penerimaan pajak pada 2013 membuat pemerintah gagal mencapai target *tax ratio* yang dibidik. Pemerintah tercatat hanya bisa memenuhi *tax ratio* sebesar 11,47% atau lebih rendah dari target 12,21%. Rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan pengulangan dari prestasi (kegagalan) pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Namun menurut Brodjonegoro (2015), tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target karena bukan perekonomian yang jelek tapi disebabkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan. Sebagaimana hasil dari OECD *economic survey*, (2015) sejak

tahun 2012, perekonomian Indonesia mengalami banyak gejolak namun pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEAN.

Kondisi berbeda terlihat dalam realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II pada tahun 2014 mencapai Rp6,862 triliun atau 103,74 persen dari target sebesar Rp6,615 triliun. Hal ini didukung oleh data dari Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga dimana penerimaan pajak tahun 2014 telah melampaui target. Penerimaan pajak sebesar Rp 374.394.540.561 atau mencapai 103,14% dari target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 362.987.927.309. Capaian ini naik sebesar 9,4% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Selain itu pendapatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen pada 2014 melampaui target. Dari target yang direncanakan sebesar Rp 221,51 miliar hingga akhir tahun terealisasi 240,36 miliar.

Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal ini menandakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya ditentukan oleh PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang

diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya.

Sementara itu, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu inflasi (Rahmany, 2014). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (2014) menyatakan, penerimaan pajak akan lebih baik karena tren penurunan inflasi yang menyebabkan kenaikan pada pendapatan Rumah Tangga. Penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat. Penurunan angka inflasi pada tahun 2014 akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sehingga kondisi ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara.

Potensi penerimaan pajak salah satunya sangat tergantung pada tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang besaran nilainya ditentukan oleh kondisi perekonomian makro dimana salah satu indikatornya dilihat dari nilai kurs rupiah per US Dolar. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Yuksel, Orhan, dan Oztunc dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara penerimaan pajak dan variabel ekonomi makro salah satunya berupa nilai tukar.

Banyaknya tenaga kerja juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Rata-rata jumlah tenaga kerja di wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo rata-rata sebanyak lima ratus ribuan orang yang bekerja. Jumlah ini berfluktuasi dimana tahun 2013 jumlah

tenaga kerja menurun dibandingkan tahun 2012. Namun tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dibanding tahun 2012 dan 2013. Semakin banyak tenaga kerja dalam suatu wilayah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan, sehingga akan ada tambahan penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh antara PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Usman dan Subroto dalam Istianto (2011) pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Dari definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Menurut Siti dalam Yeni (2013) faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian

Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan Secara

formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Namun keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak.

2. Tingkat Intelegibilitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus harus orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. Menurut Smith dikutip oleh Waluyo (2006) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. *Equity/Equality* di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
2. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

4. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Tarigan (2005) menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di daerah pada perekonomian wilayah merupakan peningkatan pendapatan masyarakat atau penduduk secara keseluruhan yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi pada wilayah tersebut dan biasanya dilakukan perhitungan nilai harga berlaku akan tetapi untuk melihat lebih lanjut setiap tahun maka harus dinyatakan dalam bentuk riil yang artinya dibentuk secara harga konstan. Sedangkan menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan adalah harga barang dan jasa yang biasa terjadi dimana permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih

banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa, tidak semua yang namanya kenaikan harga selalu diidentikan dengan inflasi.

Inflasi biasanya dibedakan atas tiga bentuk Sukirno (2012) yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.
2. Inflasi Desakan Biaya, apabila perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi yang meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang (inflasi).
3. Inflasi Diimpor, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Nilai tukar atau yang sering disebut dengan kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan. Nilai tukar atau disebut juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing, dikenal ada empat jenis, yaitu:

1. *Selling rate* (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.

2. *Middle rate* (kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang ditetapkan oleh Bank Central pada suatu saat tertentu.
3. *Buying rate* (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.
4. *Flat rate* (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli *bank notes* dan *traveler cheque*, di mana dalam kurs tersebut telah diperhitungkan promosi dan biaya lainlain.

Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Golongan bekerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu bekerja penuh dan setengah pengangguran. Menurut pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, bekerja penuh adalah pemanfaatan tenaga kerja secara optimal dari segi jam kerja maupun keahlian. Sedangkan setengah menganggur adalah mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja diukur dari segi jam kerja, produktivitas tenaga kerja dan penghasilan yang diperoleh.

Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau

memanfaatkan sumberdaya yang ada. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara langsung terhadap Pajak. Nurcholis (2005) yang mengatakan Jika PDRB meningkat maka kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak

Dirjen Pajak, Rahmany (2014) mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat. (Rahmany: 2014) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra (2014) dimana tingkat inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut Ferdiawan (2015) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun juga ada penelitian lain yaitu Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Nilai Kurs Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat mempengaruhi harga. Peningkatan atau penurunan penghasilan wajib pajak

akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah dan potensi beban pajak penghasilan wajib pajak. Ferdiawan (2015) menemukan bahwa nilai kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Nilai kurs berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak

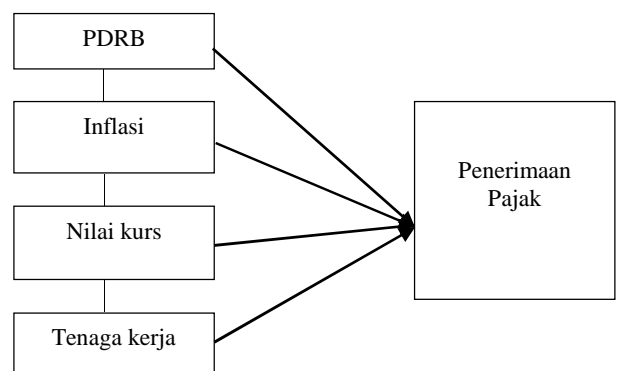
Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi diantara yaitu tenaga kerja (Sukirno dalam Rustiono, 2008). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Model penelitian ini ditujukan untuk menguji hubungan antara PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak. Dari 5 hipotesis yang telah dirumuskan, maka dapat dibangun sebuah model penelitian, disajikan padagambar model penelitian berikut ini:



Gambar 1. Model Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Berdasarkan populasi tersebut maka penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling *non-probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang (Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Jenis Data

Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif dengan metode *explanatory research*, yaitu menekankan hubungan antara variabel-variabel penelitian (variabel dependen dan variabel independen) dan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi data sekunder yaitu laporan penerimaan pajak, PDRB, inflasi, nilai kurs dan jumlah tenaga kerja wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi dari variabel dependen dan independen dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan pajak

Penerimaan pajak adalah jumlah pajak yang diterima oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk wilayah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.

b. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah jumlah PDRB yang dimiliki untuk masing-masing wilayah yaitu Cilacap, Banyumas, Purbalingga,

Kebumen dan Purworejo pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.

c. Inflasi

Inflasi dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.

d. Nilai kurs

Nilai kurs dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap US Dolar yang terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.

e. Tenaga kerja

Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja yang ada di masing-masing wilayah yaitu Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial maupun secara simultan.

1. Uji asumsi klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2011).

b. Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk

menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

- c. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2011).

2. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Model persamaan regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y : Penerimaan pajak

a : konstanta

$b_{1,2,3,4}$: koefisien regresi untuk variabel X_1, X_2, X_3, X_4

X_1 : PDRB

X_2 : Inflasi

X_3 : Nilai kurs

X_4 : Tenaga kerja

e : Faktor pengganggu di luar model (kesalahan regresi)

a. Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

b. Uji Parsial (uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

$H_0 : b_i = 0$

$H_A : b_i \neq 0$

1) Pengaruh PDRB (X_1) terhadap Penerimaan pajak (Y).

$H_{01} : b_1 = 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_1 terhadap Y

$H_{a1} : b_1 > 0$, terdapat pengaruh positif X_1 terhadap Y

2) Pengaruh Inflasi (X_2) terhadap Penerimaan pajak (Y).

$H_{02} : b_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_2 terhadap Y

$H_{a2} : b_2 > 0$, terdapat pengaruh positif X_2 terhadap Y

3) Pengaruh Nilai kurs (X_3) terhadap Penerimaan pajak (Y).

$H_{03} : b_3 = 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

$H_{a3} : b_3 > 0$, terdapat pengaruh positif X_3 terhadap Y

4) Pengaruh Tenaga kerja (X_4) terhadap Penerimaan pajak (Y).

$H_{04} : b_4 = 0$, tidak terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

$H_{a4} : b_4 > 0$, terdapat pengaruh positif X_4 terhadap Y

Ketentuan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

1) Jika tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, H_0 ditolak dan H_a diterima

2) Jika tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, H_0 diterima dan H_a ditolak

c. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut :

1) Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya :

Ho : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti ada pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Y

2) Membuat keputusan uji F

Jika nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Berikut hasil penelitian mengenai pengaruh dari PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak (Studi kasus pada Kabupaten

Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo).

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi dapat dipakai. Uji tersebut meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2011).

Tabel 1.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0001369
	Std. Deviation	124850227629.75558000
	Absolute	.137
Most Extreme Differences	Positive	.129
	Negative	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z		.613
Asymp. Sig. (2-tailed)		.847

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,847 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 2.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	819805563948.824	1016420611837.094		.807	.433		
PDRB	.005	.002	.478	2.786	.014	.500	2.001
INFLASI	4673839577.291	5655688535.874	.110	.826	.422	.832	1.202
NILAI_KURS	-99076883.533	96862711.597	-.130	-	.323	.910	1.099
TENAGA_KERJA	781475.564	320175.645	.428	2.441	.028	.477	2.094

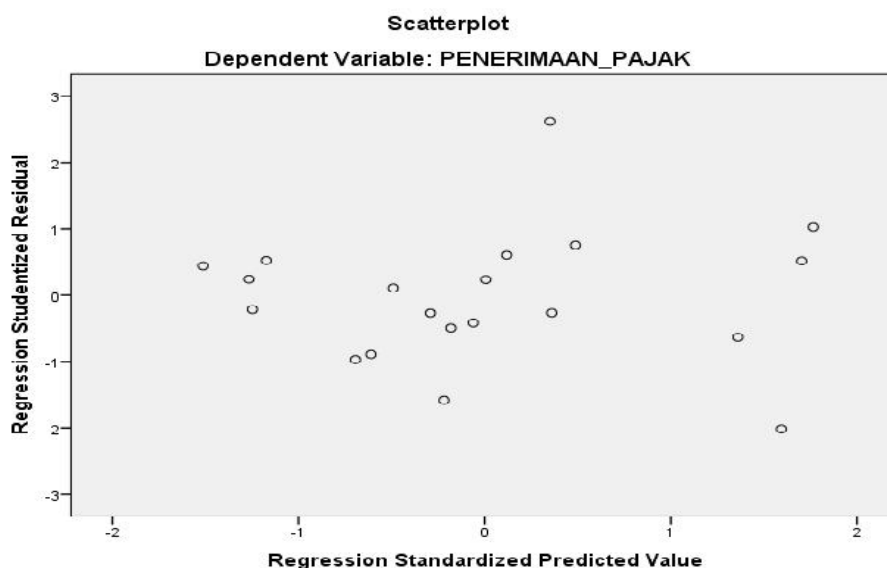
a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai tolerance variabel PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja yakni 0,500; 0,832; 0,910; dan 0,477 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja yakni 2,001; 1,202; 1,099; dan 2,094 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2011).



Gambar 2. Uji grafik plot

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali serta penyebaran titik titik data tidak berpola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4) terhadap variabel penerimaan pajak (Y). Berikut adalah hasil *output* spss

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	819805563948.824	1016420611837.094		.807	.433
1 PDRB	.005	.002	.478	2.786	.014
INFLASI	4673839577.291	5655688535.874	.110	.826	.422
NILAI_KURS	-99076883.533	96862711.597	-.130	-1.023	.323
TENAGA_KERJA	781475.564	320175.645	.428	2.441	.028

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Berdasarkan Tabel 3, didapat koefisien regresi sehingga persamaan regresinya dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = 819805563948.824 + 0,005X_1 + 4673839577.291X_2 + (-99076883.533)X_3 + 781475.564X_4 + e$$

Penjelasan:

a. Konstanta (a)

a (*alpha*) pada persamaan diatas adalah nilai konstanta atau nilai tetap penerimaan pajak (Y) yang tidak dipengaruhi oleh PDRB (X₁), inflasi (X₂), nilai kurs (X₃) dan tenaga kerja (X₄), maka penerimaan pajak (Y) bernilai sebesar nilai konstanta yaitu 819805563948.824.

b. Variabel Independen

1) b₁ = 0,005

Koefisien regresi untuk PDRB (X₁) sebesar 0,005, artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel PDRB (X₁), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 0,005 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

2) b₂ = 4673839577.291

Koefisien regresi untuk inflasi (X₂) sebesar 4673839577.291, artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel inflasi (X₂), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 4673839577.291 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

3) b₃ = (-99076883.533)

Koefisien regresi untuk nilai kurs (X₃) sebesar (-99076883.533), artinya setiap kenaikan/ bertambahnya satu satuan pada variabel nilai kurs (X₃), akan menyebabkan perubahan/berkurangnya penerimaan pajak (Y) sebesar

99076883.533 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

4) b₄ = 781475.564

Koefisien regresi untuk tenaga kerja (X₄) sebesar 781475.564, artinya setiap kenaikan/bertambahnya satu satuan pada variabel tenaga kerja (X₄), akan menyebabkan perubahan/bertambahnya penerimaan pajak (Y) sebesar 781475.564 poin, apabila variabel independen lain nilainya tetap.

Pengujian hipotesis pengaruh PDRB (X₁), inflasi (X₂), nilai kurs (X₃) dan tenaga kerja (X₄) terhadap penerimaan pajak (Y)

Untuk menguji koefisien regresi secara sendiri-sendiri pengaruh variabel PDRB (X₁), inflasi (X₂), nilai kurs (X₃), dan tenaga kerja (X₄) terhadap penerimaan pajak (Y) digunakan uji t. Ketentuan pengujian, tingkat signifikan sebesar 5% (= 0,05), tingkat keyakinan sebesar 95% (0,95). Pedoman penarikan kesimpulan yaitu jika nilai signifikansi < 0,05, dan t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan jika nilai signifikansi > 0,05, dan t hitung < t tabel maka Ho diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa:

a) Variabel PDRB (X₁) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung 2,786 > t tabel 2,08596 dengan tingkat signifikan 0,014 < dari nilai = 0,05, yang berarti PDRB (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dipengaruhi oleh tinggi rendahnya PDRB. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi penerimaan pajak di

wilayah tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal yang sama juga didukung oleh Marliyanti dan Arka (2014) dan juga Nurcholis (2005).

- b) Variabel inflasi (X_2) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung $0,826 < t_{\text{tabel}} 2,08596$ dengan tingkat signifikan $0,422 >$ dari nilai $= 0,05$ yang berarti inflasi (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tidak dipengaruhi oleh inflasi. Masalah yang muncul pada penerimaan pajak yaitu belum mencapai target yang telah ditentukan karena tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Hasil penelitian ini didukung oleh Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.
- c) Variabel nilai kurs (X_3) terhadap penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung $(-1,023) < t_{\text{tabel}} 2,08596$ dengan tingkat signifikan $0,323 > = 0,05$ yang berarti nilai kurs (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap,

d) Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tidak dipengaruhi oleh nilai kurs. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo rata-rata dari hasil perkebunan, pertanian, dan perdagangan regional dan nasional. Hanya sedikit terjadi perdagangan internasional sehingga tinggi rendahnya nilai kurs tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Ferdiawan (2015).

e) Variabel tenaga kerja (X_4) terhadap variabel penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai t hitung $2,441 > t_{\text{tabel}} 2,08596$ dengan tingkat signifikan $0,028 <$ dari nilai $= 0,05$, yang berarti tenaga kerja (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (Y). Penerimaan pajak pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tenaga kerja. Semakin tinggi tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut maka semakin tinggi penerimaan pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh Sukirno dalam Rustiono, (2008) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

Uji simultan (uji F)

Uji simultan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	1046065766362136 300000000.000	4	2615164415905340 70000000.000	13.245	.000 ^b
Residual	2961640074448341 00000000.000	15	1974426716298894 00000000.000		
Total	1342229773806970 400000000.000	19			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

b. Predictors: (Constant), TENAGA_KERJA, NILAI_KURS, INFLASI, PDRB

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000 dan f hitung sebesar 13,245 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

bersama-sama variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4), berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerimaan pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 5. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.779	.721	140514295226.461

a. Predictors: (Constant), TENAGA_KERJA, NILAI_KURS, INFLASI, PDRB

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Berdasarkan tabel 5, *adjusted R Square* mempunyai nilai 0,721 artinya kontribusi variabel PDRB (X_1), inflasi (X_2), nilai kurs (X_3) dan tenaga kerja (X_4) terhadap penerimaan pajak (Y) adalah 72,1% sedangkan sisanya $(100 - 72,1) = 27,9\%$ dipengaruhi variabel lain diluar model.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai analisis Pengaruh PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Sedangkan secara simultan, PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Dapat dijelaskan bahwa sebesar 72,1% variasi perubahan realisasi penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo secara bersama-sama oleh variasi PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja, sedangkan sisanya sebesar 27,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sumber pendapatan/penghasilan pada wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo rata-rata dari pertanian, perkebunan, dan perdagangan regional serta perdagangan nasional maka belum bisa maksimal untuk mencapai target penerimaan pajak. Kedepannya semakin banyak kegiatan perdagangan yang berskala internasional maka akan meningkat pula penerimaan pajak di wilayah tersebut, sehingga target pajak yang ditetapkan akan tercapai atau bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan tersebut.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya untuk beberapa wilayah saja yang ada dalam DJP Jateng II. Selain itu penelitian ini hanya meneliti pengaruhnya terhadap total penerimaan pajak setiap KPP Pratama yang diteliti saja.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperluas objek penelitian yaitu tidak hanya pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo tetapi semua wilayah yang tergabung dalam DJP Jateng II. Selain itu juga bisa ditambahkan faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini 27,9% masih dipengaruhi oleh faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ferdiawan, Mohammad Andhika. 2015. Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs

- terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2005 – 2014. Di akses pada 15 Mei 2016. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/147>.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hyman, D.N. 2011. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. 10th edn. Mason: South-Western Cengage Learning.
- Istianto, Donna Dwi. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kabupaten Semarang tahun 2000 – 2009. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Marliyanti, Dwi Sundi dan Arka, Sudarsana. 2014. Pengaruh PDRB terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) kota Denpasar. *E-Journal EP Unud*. Vol. 3 No. 6:265-271.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Cetakan kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nalendra, Encep Herdiana Rachman. _____. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak (survei pada provinsi Jawa Barat periode 2008 – 2012. Diakses dari <http://elib.unikom.ac.id/download>
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintah dan Otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rachman, Encep Herdiana. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2012). <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-encepherdi-35766>
- Rahmany, Fuad. 2014. Kepatuhan wajib pajak masih minim (online). Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/makro/14/09nble57-kepatuhan-wajib-pajak-masih-minim> (10 Mei 2016)
- Rahmany, Fuad. 2011. *Banyak Orang Kaya & Pengusaha Tak Bayar Pajak*. Diakses pada 21 Mei 2011 dari world wide web : <http://economy.okezone.com/read/2011/05/21/20/459419/dirjen-pajak-banyak-orang-kaya-pengusaha-tak-bayar-pajak>
- Sugiono. 2008. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Wijayanti, Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro. *Skripsi*. http://eprints.undip.ac.id/46504/1/17_WIJAYANTI.pdf.
- Yeni. Rahma. 2013. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- <http://m.tribunnews.com/bisnis/2014/03/24/inflasi-melambat-penerimaan->

- pajak-diyakini-lebih-baik-dari-2013 diakses 12 Mei 2016
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20338741.pdf> diakses 12 Mei 2016
- <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-107449.pdf> diakses 12 Mei 2016
- [http://eprints.undip.ac.id/46504/1/17_WIJA YANTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/46504/1/17_WIJA_YANTI.pdf) diakses 12 Mei 2016
- <http://sport.detik.com/aboutthegame/read/2014/06/12/163533/2606547/4/asumsi-kurs-berubah-setoran-pajak-bertambah-rp-4-triliun> diakses 12 Mei 2016
- <http://nasional.kontan.co.id/news/nilai-tukar-rupiah-jadi-tantangan-apbn-tahun-ini>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369867/rupiah-turun-indonesia-genjot-penerimaan-pajak> diakses 12 Mei 2016
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/14/122832126/Realisasi.Pajak.2014.Terendah.dalam.25.Tahun.Terakhir> diakses 12 Mei 2016
- <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/perkumpulan-prakarsa-penerimaan-pajak-2013-tidak-mencapai-target-apbn-p-2013> diakses 12 Mei 2016
- <http://id.123doc.org/document/44987-pengaruh-nilai-tukar-mata-uang-rupiah-dan-tingkat-inflasi-terhadap-penerimaan-pajak-pertamabahan-nilai-impor-pada-kantor-pelayanan-pajak-madya-medan.htm> diakses 12 Mei 2016
- <http://www.jatengprov.go.id/id/newsroom/naik-94-kpp-pratama-lampau-target-penerimaan-pajak-2014> diakses 12 Mei 2016